

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 72/O/2024
TENTANG
SATUAN PELAKSANA DAN PERANGKAT ORGANISASI UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diberikan kewenangan untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk memperlancar tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Wilayah Kerja Satuan Pelaksana dan Perangkat Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- c. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16/P/2023 tentang Satuan Pelaksana dan Perangkat Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Satuan Pelaksana dan Perangkat Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 680);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATUAN PELAKSANA DAN PERANGKAT ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan:

- a. Satuan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Satpel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

- b. Perangkat Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Perangkat Organisasi UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Satpel sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Satpel I meliputi 5 (lima) Provinsi, melayani 39 (tiga puluh sembilan) satuan kerja;
- b. Satpel II meliputi 5 (lima) Provinsi, melayani 29 (dua puluh sembilan) satuan kerja;
- c. Satpel III meliputi 3 (tiga) Provinsi, melayani 107 (seratus tujuh) satuan kerja;
- d. Satpel IV meliputi 3 (tiga) Provinsi, melayani 37 (tiga puluh tujuh) satuan kerja;
- e. Satpel V meliputi 3 (tiga) Provinsi, melayani 22 (dua puluh dua) satuan kerja;
- f. Satpel VI meliputi 5 (lima) Provinsi, melayani 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja;
- g. Satpel VII meliputi 6 (enam) Provinsi, melayani 36 (tiga puluh enam) satuan kerja; dan
- h. Satpel VIII meliputi 4 (empat) Provinsi, melayani 26 (dua puluh enam) satuan kerja.

KETIGA : Satpel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipimpin oleh Koordinator Satpel sebagai perpanjangan tangan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu.

KEEMPAT : Koordinator Satpel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Satpel yang mempunyai tugas membantu dukungan administratif pada wilayah kerja tertentu.

KELIMA : Perangkat Organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Ketua Tim Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Ketua Tim Kerja Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. Ketua Tim Kerja Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan.

KEENAM : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
- d. penelaahan usul pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
- e. penyiapan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pinjaman, atau hibah; dan
- f. koordinasi dan fasilitasi pemrosesan rekomendasi bebas bea masuk dan pajak barang/alat pendidikan dan barang penunjang/peraga bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi.

- KETUJUH : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b mempunyai tugas:
- a. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
 - b. pemutakhiran standardisasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian;
 - c. fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. pengelolaan sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
 - e. penyusunan strategi pengadaan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral di lingkungan Kementerian.
- KEDELAPAN : Ketua Tim Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c mempunyai tugas:
- a. Penyiapan bahan pembinaan teknis jabatan fungsional bidang Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. pengelolaan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian.
- KESEMBILAN : Ketua Tim Kerja Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d mempunyai tugas:
- a. analisis pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
 - b. fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
 - c. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian; dan
 - d. penyiapan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian.

- KESEPULUH : Ketua Tim Kerja Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf e mempunyai tugas:
- a. penyiapan bahan kebijakan dan pembinaan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa pada satuan Pendidikan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pemrosesan rekomendasi bebas bea masuk dan pajak barang/alat pendidikan dan barang penunjang/peraga bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi.
- KESEBELAS : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 16/P/2023 tentang Satuan Pelaksana dan Perangkat Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA BELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Simul
NIP 196505021988031002

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 72/O/2024
TENTANG
SATUAN PELAKSANA DAN PERANGKAT
ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SATUAN PELAKSANA

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
1	SATPEL I	Aceh	LLDIKTI Wilayah XIII	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Dan Sumatera Barat, Terdiri Atas: 1. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara 2. Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh 3. Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau 4. Balai Guru Penggerak Provinsi Riau 5. Balai Guru Penggerak Sumatera Barat
		Sumatera Utara	LLDIKTI Wilayah I	
		Kepulauan Riau	Tempat penugasan sebagai PP/PPK	
		Riau	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau	
		Sumatera Barat	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat	

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				6. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
				7. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh
				8. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
				9. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau
				10. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
				11. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan Dan Listrik
				12. Balai Bahasa Provinsi Aceh
				13. Balai Bahasa Provinsi Riau
				14. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
				15. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara
				16. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
				17. LLDIKTI Wilayah I
				18. LLDIKTI Wilayah X
				19. LLDIKTI Wilayah XIII

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				20. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I
				21. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II
				22. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
				23. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV
				24. Universitas Malikussaleh
				25. Universitas Maritim Raja Ali Haji
				26. Universitas Negeri Medan
				27. Universitas Riau
				28. Universitas Samudra
				29. Universitas Teuku Umar
				30. ISBI Aceh
				31. ISI Padang Panjang
				32. Politeknik Negeri Batam
				33. Politeknik Negeri Bengkalis
				34. Politeknik Negeri Lhokseumawe
				35. Politeknik Negeri Medan
				36. Politeknik Negeri Padang
				37. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				38. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat 39. LLDIKTI Wilayah XVII
2	Satpel II	Jambi	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu Dan Lampung, Terdiri Atas: 1. Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu 2. Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi 4. Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung 5. Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan 6. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bangka Belitung 7. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu 8. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi
		Sumatera Selatan	LLDIKTI Wilayah II	
		Bangka Belitung	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bangka Belitung	
		Bengkulu	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu	
		Lampung	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung	

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				9. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung 10. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 11. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 12. Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung 13. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu 14. Kantor Bahasa Provinsi Jambi 15. Kantor Bahasa Provinsi Lampung 16. LLDIKTI Wilayah II 17. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V 18. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI 19. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII 20. Universitas Bangka Belitung 21. Universitas Bengkulu 22. Universitas Jambi 23. Universitas Lampung 24. Universitas Sriwijaya 25. Institut Teknologi Sumatera

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				26. Politeknik Negeri Lampung 27. Politeknik Negeri Sriwijaya 28. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 29. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
3	SATPEL III	Banten	UKPBJ	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Banten, DKI Jakarta, Dan Jawa Barat, Terdiri Atas: 1. Biro Hukum 2. Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat 3. Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
		DKI Jakarta		4. Biro Organisasi Dan Tata Laksana 5. Biro Perencanaan 6. Biro Sumber Daya Manusia 7. Biro Umum Dan Pengadaan Barang Dan Jasa 8. Pusat Data Dan Teknologi Informasi 9. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan
		Jawa Barat	Balai Guru Penggerak Jawa Barat	10. Pusat Prestasi Nasional 11. Pusat Penguatan Karakter
				12. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 13. Sekretariat Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan 14. Direktorat Pendidikan Profesi Guru 15. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan 16. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dan

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				Pendidikan Masyarakat 17. Direktorat Guru Pendidikan Dasar 18. Direktorat Guru Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus 19. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah 20. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 21. Direktorat Sekolah Dasar 22. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 23. Direktorat Sekolah Menengah Atas 24. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 25. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 26. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan 27. Direktorat Kursus Dan Pelatihan

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				28. Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi 29. Direktorat Kelembagaan Dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi 30. Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dunia Usaha Dan Dunia Industri 31. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 32. Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan 33. Direktorat Kelembagaan 34. Direktorat Sumber Daya 35. Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 36. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 37. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				38. Direktorat Perfilman, Musik, Dan Media 39. Direktorat Pelindungan Kebudayaan 40. Direktorat Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan 41. Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan 42. Sekretariat Lembaga Sensor Film 43. Sekretariat Inspektorat Jenderal 44. Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 45. Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan 46. Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran 47. Pusat Asesmen Pendidikan 48. Pusat Perbukuan 49. Sekretariat Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa 50. Pusat Pengembangan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				51. Pusat Pembinaan Bahasa Dan Sastra
				52. Pusat Penguatan Dan Pemberdayaan Bahasa
				53. Balai Pengembangan Talenta Indonesia
				54. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
				55. Balai Layanan Platform Teknologi
				56. Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi
				57. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat
				58. Balai Guru Penggerak Provinsi Banten
				59. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat
				60. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten
				61. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
				62. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				Bidang Mesin dan Teknik Industri 63. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata 64. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian 65. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat 66. Kantor Bahasa Provinsi Banten 67. LLDIKTI Wilayah III 68. LLDIKTI Wilayah IV 69. Balai Media Kebudayaan 70. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII 71. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX 72. Museum dan Cagar Budaya 73. Universitas Negeri Jakarta 74. UPN Veteran Jakarta 75. Universitas Siliwangi

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				76. Universitas Singaperbangsa Karawang 77. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 78. ISBI Bandung 79. Politeknik Manufaktur Negeri Bandung 80. Politeknik Negeri Bandung 81. Politeknik Negeri Indramayu 82. Politeknik Negeri Jakarta 83. Politeknik Negeri Media Kreatif 84. Politeknik Negeri Subang 85. Kantor Pusat Atase
4	Satpel IV	D.I Yogyakarta	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan D.I. Yogyakarta	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Jawa Timur, Terdiri Atas: 1. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi D.I Yogyakarta 2. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah
		Jawa Tengah	Balai Bahasa Jawa Tengah	
		Jawa Timur	LLDIKTI Wilayah VII	

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				3. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur
				4. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika
				5. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni Dan Budaya
				6. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
				7. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur
				8. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
				9. Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta
				10. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
				11. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
				12. LLDIKTI Wilayah V
				13. LLDIKTI Wilayah VI
				14. LLDIKTI Wilayah VII

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				15. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
				16. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI
				17. Universitas Jember
				18. Universitas Jenderal Soedirman
				19. UPN Veteran Jawa Timur
				20. UPN Veteran Yogyakarta
				21. Universitas Tidar
				22. Universitas Trunojoyo Madura
				23. ISI Surakarta
				24. ISI Yogyakarta
				25. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
				26. Politeknik Maritim Negeri Indonesia
				27. Politeknik Negeri Banyuwangi
				28. Politeknik Negeri Cilacap
				29. Politeknik Negeri Jember
				30. Politeknik Negeri Madiun
				31. Politeknik Negeri Madura
				32. Politeknik Negeri Malang
				33. Politeknik Negeri Semarang

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				34. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 35. Akademi Komunitas Negeri Pacitan 36. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar 37. Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta
5	Satpel V	Bali	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bali	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Terdiri Atas: 1. Balai Guru Penggerak Provinsi Bali 2. Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali 5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat 6. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
		NTB	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTB	
		NTT	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT	

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				Provinsi Nusa Tenggara Timur
				7. Balai Bahasa Provinsi Bali
				8. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
				9. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
				10. LLDIKTI Wilayah VIII
				11. LLDIKTI Wilayah XV
				12. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
				13. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI
				14. Universitas Mataram
				15. Universitas Nusa Cendana
				16. Universitas Pendidikan Ganesha
				17. Universitas Timor
				18. Universitas Udayana
				19. ISI Denpasar
				20. Politeknik Negeri Bali
				21. Politeknik Negeri Kupang
				22. Politeknik Pertanian Negeri Kupang

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
6	Satpel VI	Kalimantan Utara	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Kalimantan Utara,
		Kalimantan Timur	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Selatan,
		Kalimantan Barat	Tempat penugasan sebagai PP/PPK	Terdiri Atas: 1. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah 2. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat 3. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan 4. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur 5. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara 6. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat 7. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan 8. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
		Kalimantan Tengah	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah	
		Kalimantan Selatan	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan	

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				Provinsi Kalimantan Tengah
				9. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
				10. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
				11. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
				12. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
				13. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
				14. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
				15. LLDIKTI Wilayah XI
				16. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII
				17. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII
				18. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV
				19. Universitas Borneo Tarakan
				20. Universitas Lambung Mangkurat
				21. Universitas Mulawarman

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				22. Universitas Palangka Raya
				23. Universitas Tanjungpura
				24. Institut Teknologi Kalimantan
				25. Politeknik Negeri Balikpapan
				26. Politeknik Negeri Banjarmasin
				27. Politeknik Negeri Ketapang
				28. Politeknik Negeri Nunukan
				29. Politeknik Negeri Pontianak
				30. Politeknik Negeri Samarinda
				31. Politeknik Negeri Sambas
				32. Politeknik Negeri Tanah Laut
				33. Politeknik Pertanian Samarinda

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
7	Satpel VII	Gorontalo	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Dan Sulawesi Tenggara, Terdiri Atas: 1. Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan
		Sulawesi Utara	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	2. Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Barat
		Sulawesi Tengah	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah	3. Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo 4. Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah
		Sulawesi Barat	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat	5. Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara
		Sulawesi Selatan	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan	

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
		Sulawesi Tenggara	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara	6. Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara 7. Bbalai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 8. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo 9. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 10. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 11. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara 12. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara 13. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi 14. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				15. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah
				16. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
				17. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
				18. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
				19. LLDIKTI Wilayah IX
				20. LLDIKTI Wilayah XVI
				21. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII
				22. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII
				23. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
				24. Universitas Halu Oleo
				25. Universitas Negeri Gorontalo
				26. Universitas Negeri Makassar
				27. Universitas Negeri Manado
				28. Universitas Sam Ratulangi
				29. Universitas Sembilan Belas November Kolaka
				30. Universitas Sulawesi Barat
				31. Universitas Tadulako

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				32. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie 33. Politeknik Negeri Manado 34. Politeknik Negeri Nusa Utara 35. Politeknik Negeri Ujung Pandang 36. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
8	Satpel VIII	Maluku	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku	Seluruh Satuan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat, Terdiri Atas: 1. Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku 2. Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara 3. Balai Guru Penggerak Provinsi Papua 4. Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat 5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 6. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara
		Maluku Utara	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara	
		Papua	1. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Papua 2. LLDIKTI Wilayah XIV	
		Papua Barat	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat	
		Papua Selatan	Universitas Musamus	

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				7. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua
				8. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat
				9. Balai Bahasa Provinsi Papua
				10. Kantor Bahasa Provinsi Maluku
				11. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
				12. LLDIKTI Wilayah XII
				13. LLDIKTI Wilayah XIV
				14. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX
				15. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI
				16. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII
				17. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXIII
				18. Universitas Cendrawasih
				19. Universitas Khairun
				20. Universitas Musamus
				21. Universitas Papua
				22. Universitas Pattimura
				23. ISBI Tanah Papua
				24. Politeknik Negeri Ambon

NO.	SATPEL	PROVINSI	KANTOR	WILAYAH KERJA
				25. Politeknik Negeri Fakfak
				26. Politeknik Perikanan Negeri Tual

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Simul
NIP 196505021988031002

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 72/O/2024
TENTANG
WILAYAH KERJA SATUAN PELAKSANA
DAN PERANGKAT ORGANISASI UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERANGKAT ORGANISASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PERANGKAT ORGANISASI UKPBJ
1.	Triyantoro	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala UKPBJ
2.	Bayu Panca Hadi Saputra	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Supriyadi	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Siti Aisyah	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PERANGKAT ORGANISASI UKPBJ
5.	Fajar Adi Hemawan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Henry Eko Hapsanto	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan
7.	Zulfikar	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Koordinator Satpel I
8.	Ali Imron	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris Satpel I
9.	Ilham	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Koordinator Satpel II
10.	Dessy Fosriyani	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Sekretaris Satpel II
11.	Mila Puspitasari	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Koordinator Satpel III
12.	Dwi Wahyu Iriadi	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris Satpel III
13.	Marali	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Koordinator Satpel IV
14.	Angga Eka Wicaksana	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris Satpel IV
15.	I Made Dedy Purnama	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Koordinator Satpel V
16.	Ida Bagus Yudhi Yudhana	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris Satpel V

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PERANGKAT ORGANISASI UKPBJ
17.	Ade Kristianto	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Koordinator Satpel VI
18.	Eko Surya Wardhana	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris Satpel VI
19.	Muhammad Kahar Akbar Palinrungi	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Koordinator Satpel VII
20.	A. Lapasewang	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris Satpel VII
21.	Piter Lutlutur	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Koordinator Satpel VIII
22.	Agustinus Pieter Adrian Honoratus	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris Satpel VIII

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Simul
NIP 196505021988031002